



## DAFTAR PUSTAKA

- A Chidir Ali., *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: Eresco, 1993)
- Andriansyah , *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam kajian dan analisa*, (Jakarta : FISIP Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama Cet ke-1, 2015), h.18.
- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Riau : Suska Press, 2014 )
- Ashshofa, Burhan. *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)
- Badanpendapatandaerahkabupatenbengkalis.go.id
- Chaidir Ellydar dan Fahmi Sudi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Cet. 1 (Yogyakarta : Total Media, 2010)
- Fokusmedia, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, (Bandung, 2004)
- Gustiawan, Uwon. *Pedoman Praktis Kekuatan Umum dan tata Cara Perpajakan*, ( Jakarta: Grasindo, 2007)
- Handyaningrat Soewarno. *Landasan dan Pedoman Kerja administrasi Pemerintah Derah kota dan desa*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1993)
- [http:// camatmandau.bengkalis.go.id/webstatistik/letak-geografis/1](http://camatmandau.bengkalis.go.id/webstatistik/letak-geografis/1)
- Ilyas Wirawan B.- Burton Richard, *hukum Pajak : Teori, Analisis dan Perkembangannya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013)
- Kansil C.S.T, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, Cet ke-4, 2011)
- Mardiasmo, *otonomi dan Managemen Keuangan daerah*, (Yogyakarta : Andi yogyakarta, 2004)
- Muin Fatkhul, *Jurnal Otonomi daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah- Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, 2014.*
- Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945
- Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah
- Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja
- Santoso Brotodihardjo R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1988)
- Samah Abu, *Memahami Hukum Pajak Di Indonesia*, (Pekanbaru, Hasil Cetakan, 2016)
- Siahaan Marihot Pahala, *Hukum Pajak Formal*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Siahan Marihot Pahala, *Hukum Pajak Material*, (Yogyakarta : Garaha Ilmu, 2010)

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sinulingga Emanuel Evans, *Jurnal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.
- Soejito Irwan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)
- Soemitro Rachmad, *Azas dan Perpajakan*, (Bandung : Rafika Aditama, 1986)
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet ke-4, 2012).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Syaifi Inu Kencana dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Una, Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah, Menurut Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2004)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Tutik, Titik, Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2010 )
- Ubaedillah A. dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*), (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Widjaja Haw. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2005)
- Yani Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Yuswanto, dkk. *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013)